

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut North (1990) seorang sejarawan ekonomi menjelaskan bahwa kelembagaan adalah batasan yang dibuat untuk membentuk pola interaksi yang harmonis antara individu dalam melakukan interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Knight (1992) menjelaskan bahwa kelembagaan merupakan serangkaian peraturan yang membangun struktur interaksi dalam sebuah komunitas. Kelembagaan merupakan suatu aturan yang berlaku dalam masyarakat dengan kesepakatan bersama sebagai aturan yang harus diikuti dan dipatuhi. Kelembagaan memiliki tujuan guna menciptakan keteraturan dan kepastian hubungan antara sesama anggota dalam masyarakat (Saskara, 2017). Dalam sektor pertanian terdapat kelembagaan pertanian sebagai penunjang sarana dan prasarana petani dalam kegiatan usahatani. Kelembagaan pertanian merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang pertanian yang berada di kawasan lokal dengan memiliki anggota dari warga setempat.

Dalam kelembagaan pertanian, terdapat beberapa macam kelembagaan pertanian yang terbagi dalam beberapa bentuk sebagai berikut.

1. Kelembagaan pertanian, yaitu lembaga yang berupa kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi.
2. Kelembagaan pemerintah, yaitu lembaga yang berbentuk seperti lembaga penyuluhan di tingkat nasional, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.
3. Kelembagaan swasta, yaitu lembaga yang bergerak di bidang pengadaan sarana prasarana produksi, keuangan, serta distribusi.

4. Kelembagaan lembaga swadaya masyarakat, yaitu lembaga yang bergerak di bidang pengujian/riset dan penyuluhan (Mulyana, 2022).

Kelembagaan pertanian sebagai faktor penunjang kegiatan pertanian di pedesaan memiliki sifat naik turun dan sesuai dengan kebutuhan. Kelembagaan pertanian dapat bersifat formal dengan bantuan baik dari *sponsorship* maupun pemerintah dan non formal seperti lembaga yang terbentuk atas tuntutan kebutuhan petani di lapang. Biasanya, kelembagaan yang bersifat formal kurang diperhatikan eksistensinya karena adanya batasan-batasan yang bertentangan dengan pemahaman petani (Mulyana, 2022). Meskipun pada dasarnya kelembagaan pertanian diperlukan dalam proses kegiatan usahatani, tetapi adakalanya eksistensi kelembagaan pertanian justru tidak terlihat dan bahkan sampai tidak lagi eksis.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (2022) terdapat data jumlah kelompok tani di seluruh Indonesia tahun 2021. Kelompok tani di Indonesia dikategorikan dalam 5 kategori kelas kelompok, yaitu kelas kelompok pemula, lanjut, madya, utama, dan belum diketahui. Jumlah kelompok tani di Indonesia sebesar 700.353 dengan kategori pemula sebesar 409.597 kelompok, lanjut sebesar 162.281 kelompok, kelas kelompok madya sebesar 27.940, kelas kelompok utama sebesar 2.816 kelompok, dan kelas yang belum diketahui sebesar 97.353

Dalam pengklasifikasian kelompok tani di Indonesia, Jawa Timur menempati nomor urut ke 4 dari 34 provinsi dengan presentase total kelompok tani sebesar 6,27% dengan total kelompok tani sebesar 48.939 kelompok tani. Kelompok tani di Jawa Timur diklasifikasikan dalam 5 kelas kelompok yaitu

kelas kelompok pemula, kelas kelompok lanjut, madya, utama, dan kelas kelompok yang belum diketahui. Jumlah kelompok tani di Jawa Timur berdasarkan kelas kelompok masing-masing, meliputi 18.470 kelompok tani kelas pemula, 18.493 kelompok tani kelas lanjut, kelas madya sebesar 5.693 kelompok tani, kelas utama sebesar 484 kelompok tani, dan yang belum diketahui sebesar 5,799 kelompok tani. Sementara itu berdasarkan tabel 1.1 Jumlah Kelompok Tani Menurut Kelas Kelompok di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Jumlah Kelompok Tani (Poktan) Menurut Kelas Kelompok di Provinsi Jawa Timur, 2021

No.	Kabupaten	Kelas Kelompok				Belum Diketahui	Jumlah
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama		
1.	Sumenep	2.083	711	16	-	1837	4.647
2.	Bondowoso	2.051	669	103	6	544	1.740
3.	Lamongan	898	1.157	112	4	227	2.398
4.	Ponorogo	350	895	607	17	177	2.046
5.	Blitar	788	922	56	6	238	2.010
6.	Tuban	738	791	336	91	20	1.976
7.	Pasuruan	968	784	124	4	9	1.889
8.	Bojonegoro	415	1.104	226	8	83	1.836
9.	Jember	331	756	103	6	544	1.740
10.	Probolinggo	1.202	434	9	-	1	1.646

Sumber: Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (2022)

Dari Tabel 1.1 Jumlah Kelompok Tani (Poktan) Menurut Kelas Kelompok di Jawa Timur tahun 2021, didapatkan hasil bahwa jumlah kelompok tani berdasarkan seluruh kelas kelompok Kabupaten Bojonegoro memiliki selisih sebesar 2.811 kelompok tani dengan kabupaten yang menempati nomor pertama, Sumenep. Terdapat beberapa lembaga yang ikut serta dalam mendukung kegiatan pertanian. Kelembagaan petani merupakan suatu lembaga yang dibentuk atas dasar persamaan kepentingan, persamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya (Effendy

& Mustofa, 2020). Berdasarkan buku Ekonomi Pertanian yang termasuk lembaga pertanian yang sering ditemukan di Indonesia, yaitu Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lembaga Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP), Penyuluhan Pertanian, Lembaga Klinik Agribisnis, Lembaga Pasca Panen (Pemasaran Hasil Pertanian), Lembaga Jasa ALSINTAN, Lembaga Pengolahan Hasil Pertanian, Lembaga Permodalan, Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), dan Poktan (Kelompok Tani) (Mulyana, 2022).

Koperasi Unit Desa merupakan suatu badan usaha yang dikelola oleh masyarakat yang memiliki tempat tinggal di suatu wilayah desa hingga kecamatan setempat dan memiliki tujuan untuk menyejahterakan anggotanya (Wiguna & Sukadana, 2018). KUD atau Koperasi Unit Desa memiliki peranan penting dalam kegiatan usahatani dikarenakan lembaga ini berperan dalam memfasilitasi peminjaman modal untuk petani. Selain itu, BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa yang diatur berdasarkan Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa peranan BUMDes untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, sehingga didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut dengan BUMDes merupakan suatu badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal dan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat (Berlian Ramadana *et al.*, 2013). Lembaga pertanian ini memiliki peranan dalam kegiatan usahatani sebagai fasilitator, mediator, dan motivator sehingga dapat

membantu kegiatan pertanian dari hulu ke hilir sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Kelompok Tani atau Poktan sendiri merupakan suatu organisasi di bidang pertanian dengan petani di desa tersebut sebagai pengurus dan anggotanya. Poktan memiliki peranan sebagai wadah untuk berbagi informasi dengan sesama petani mengenai pengalaman usahatannya, memberikan solusi dari permasalahan maupun hambatan yang muncul dalam proses usahatani. Dalam kelembagaan pertanian, tentu saja pengurus organisasi juga memiliki andil dalam menyejahterakan petani dengan menjadi jembatan antara program kegiatan dengan anggotanya.

Berdasarkan data Buku Publikasi Kecamatan Kalitidu Dalam Angka 2023 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro (2023), terlihat bahwa jumlah petani di Desa Talok yaitu 1060 orang. Mata pencaharian petani merupakan mata pencaharian mayoritas masyarakat yang tinggal Kecamatan Kalitidu. Hal tersebut ditunjukkan dalam Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Kalitidu Menurut Pekerjaan tahun 2022.

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Kecamatan Kalitidu Menurut Pekerjaan, 2022

No.	Pekerjaan	Jumlah (orang)
1.	Petani	9.683
2.	Buruh	6.139
3.	Peternak	1.345
4.	Pedagang	1.482
5.	PNS/TNI/Polri	403
6.	Pengusaha Industri RUTA	186
7.	Jasa Perorangan	476

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro (2023)

Terlihat dalam Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Kalitidu Menurut Pekerjaan tahun 2022 yang dipublikasikan dalam Buku Publikasi Kecamatan Kalitidu Dalam Angka 2023 bahwa jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani menempati nomor satu dengan total 9.383 orang petani.

Inti dari koperasi yaitu sebagai usaha bersama atau kerja sama antara anggota dan pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Di setiap koperasi, anggota memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu, adanya partisipasi masyarakat sebagai anggota petani penting bagi keberlangsungan koperasi. KUD Ringin Agung memiliki 50 orang anggota dengan anggota yang memiliki pekerjaan sebagai petani hanya sekitar 10 orang saja. Hal tersebut yang menjadi pertanyaan bagi eksistensi kelembagaan KUD Ringin Agung. Minimnya partisipasi petani dalam menjadi anggota KUD Ringin Agung dapat terjadi akibat belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan dalam menunjang kegiatan usahatani petani dimana peranan fungsi kelembagaan dalam melakukan pelayanan kian menurun (Mulyana, 2022).

Sibuea (2011) melaporkan hasil penelitiannya bahwa KUD Ringin Agung memberikan tujuh layanan mencakup penyediaan kebutuhan saprodi (sarana produksi), pengumpulan hasil tani, pemasaran hasil tani, penyaluran barang kebutuhan sehari-hari, pemberian kredit pada petani, pelayanan jasa rekening listrik, dan penyuluhan pertanian. Dibandingkan dengan KUD Ringin Agung tempat penelitian ini, berbeda jauh sebab KUD Ringin Agung hanya melayani jasa pembayaran rekening listrik saja. Fenomena tersebut menunjukkan pudarnya eksistensi kelembagaan pertanian Koperasi Unit Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi, pelayanan umum, memperoleh laba bersih untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan mengembangkan sumberdaya masyarakat desa, serta memanfaatkan asset desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat. BUMDes di Desa Talok,

Kecamatan Kalitidu mengalami kemacetan dalam melaksanakan kegiatannya. Pengelolaan organisasi yang berantakan membuat kepercayaan petani sebagai anggota menurun terhadap eksistensi kelembagaan BUMDes. Padahal seharusnya kelembagaan pertanian bekerja bersama dan saling terintegrasi satu sama lain agar tidak membebani fungsi dan peranan kelembagaan lainnya. Dalam penelitian ini, kelembagaan KUD dan BUMDes dinilai memudar eksistensinya sehingga hampir seluruh penunjang kegiatan usahatani diambil alih oleh Kelompok Tani secara individu seperti pembagian subsidi benih, pupuk, dan faktor produksi lain. Fenomena tersebut dapat terjadi akibat dari peran dan fungsi kelembagaan dalam menunjang kegiatan usahatani petani yang kurang eksis dalam memenuhi kebutuhan petani (Mulyana, 2022).

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana persepsi petani dan pengurus terhadap eksistensi kelembagaan pertanian dengan judul “Persepsi Petani dan Pengurus Terhadap Eksistensi Kelembagaan Pertanian di Desa Talok, Kecamatan Kalitidu”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi petani dan pengurus terhadap eksistensi kelembagaan pertanian?
2. Bagaimana persepsi petani terhadap peranan pengurus kelembagaan pertanian dalam kelembagaan pertanian?
3. Bagaimana persepsi pengurus lembaga pertanian terhadap peranan petani dalam kelembagaan pertanian?

4. Bagaimana tingkat kepuasan petani dan pengurus terhadap eksistensi kelembagaan pertanian?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis persepsi petani dan pengurus terhadap eksistensi masing-masing kelembagaan pertanian.
2. Mengidentifikasi persepsi petani terhadap peranan pengurus kelembagaan pertanian dalam kelembagaan pertanian.
3. Mengidentifikasi persepsi pengurus lembaga pertanian terhadap peranan petani dalam kelembagaan pertanian.
4. Mengetahui tingkat kepuasan petani dan pengurus terhadap eksistensi kelembagaan pertanian.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bermanfaat bagi pihak lain yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi berkembangnya khasanah ilmu pengetahuan mengenai persepsi petani dan pengurus terhadap eksistensi kelembagaan pertanian
2. Bagi penelitian selanjutnya sebagai salah satu referensi penelitian tentang persepsi petani dan pengurus terhadap eksistensi kelembagaan pertanian.